

Menegakkan Etika dan Hukum di Negeri Para Mafioso

Adv. Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M. Ph.D.
Guru Besar HTN - Senior Partner INTEGRITY Law Firm

National Webinar Vol. 2 Jilid #5
Pusat Kajian Hukum dan Pembangunan Universitas Negeri Surabaya
Melbourne, 25 September 2021



1. Pengaturan **Etika**
2. Pelembagaan Etika dan **Problem** Efektivitasnya
3. Hukum **MINUS** Etika

OUTLINE



Pengaturan **ETIKA**

ETHICS, MORALITY & THE LAW

Moral principle is the
foundation of law.

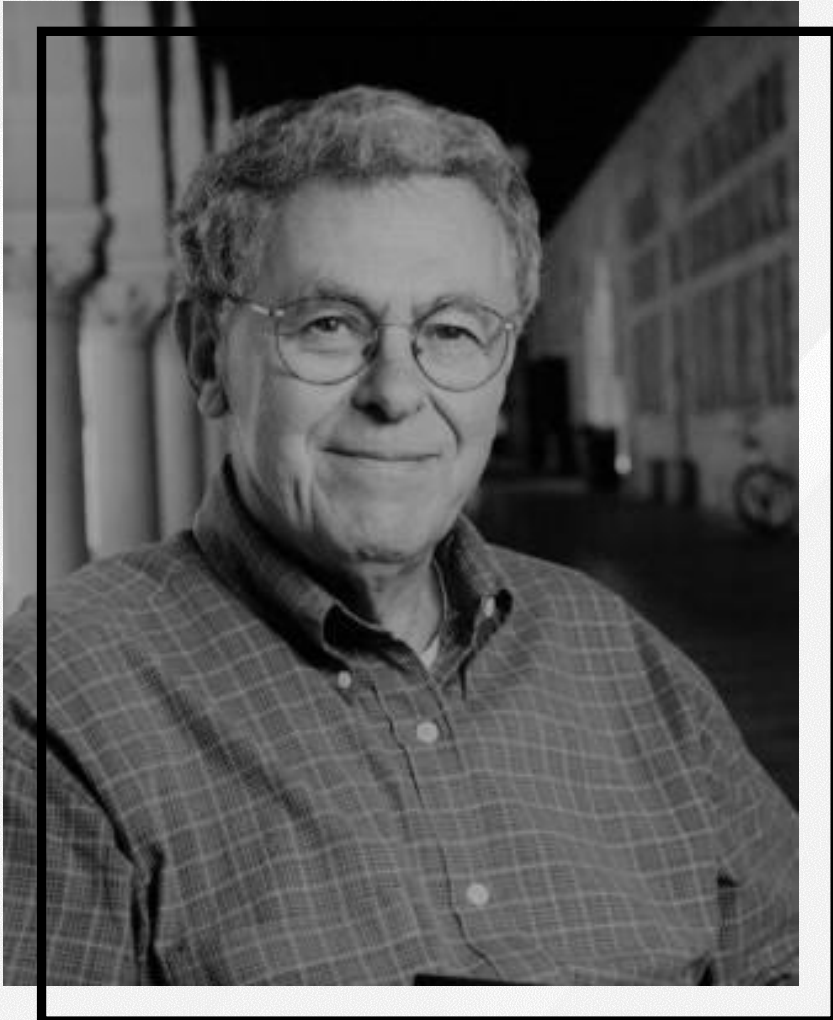
Ronald Dworkin

quote fancy

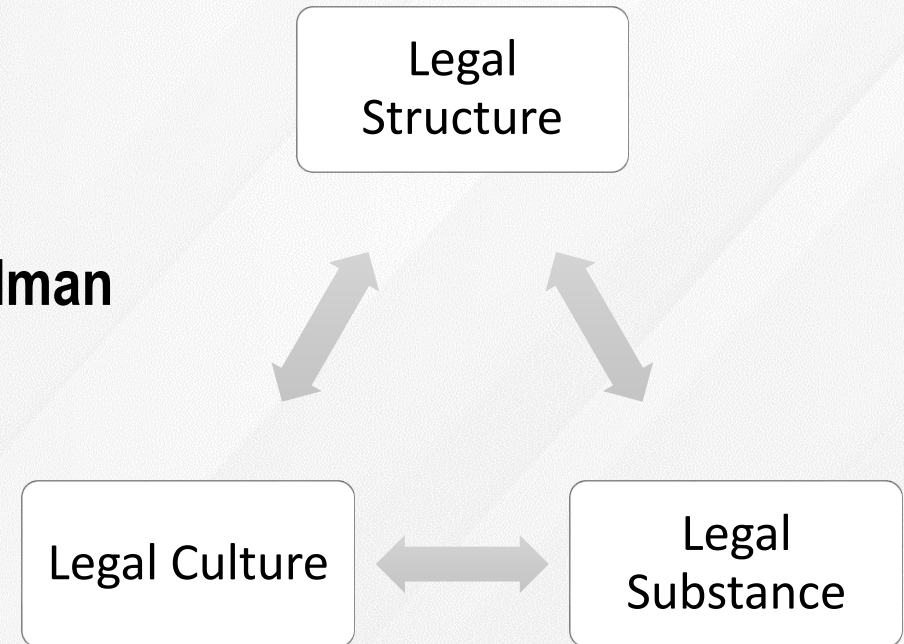
denny@integritylawfirm.id



Bekerjanya **Sistem Hukum**



Lawrence M. Friedman



Efektif dan berhasil tidaknya pembangunan dan penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan **budaya hukum (*legal culture*)**.

Legal Culture

Nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk

- Rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan;
- Budaya kompromistis untuk meloloskan diri dari aturan yang berlaku;
- Budaya memberikan “upeti” untuk menginginkan sesuatu;

Buruknya ***Legal Culture*** akan berpengaruh pada penegakan hukum yang koruptif. Faktor kebudayaan ada di masyarakat dan di penegak hukum.

- **Soerjono Soekanto**

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

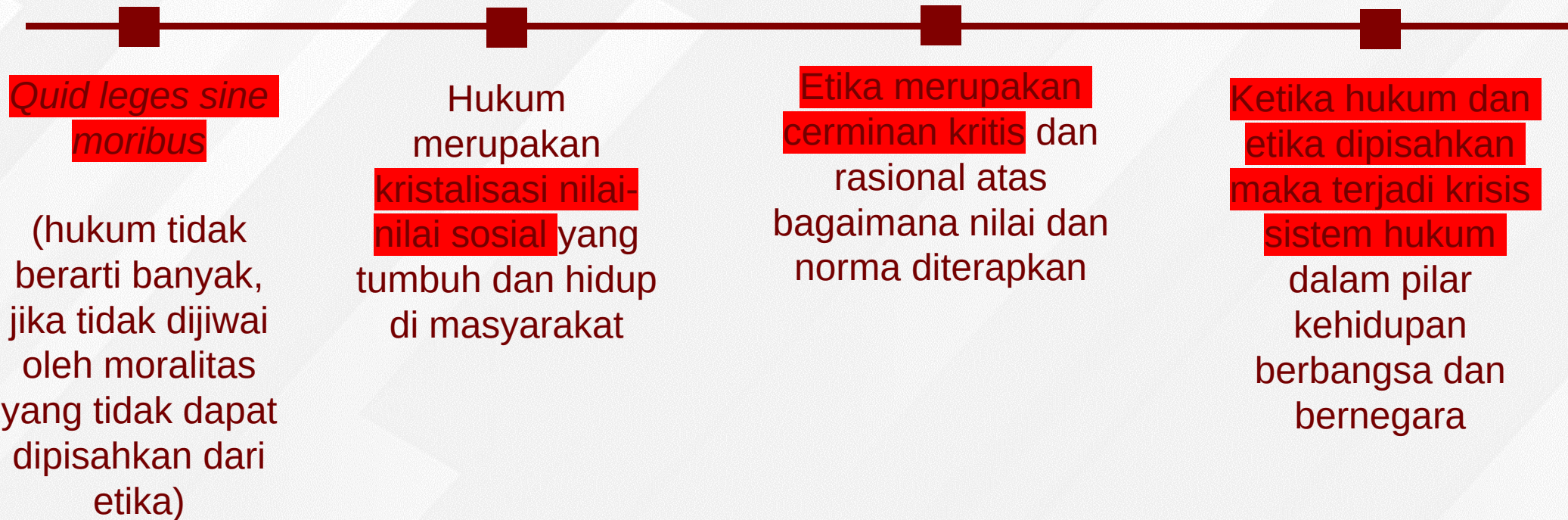


Soerjono Soekanto

1. Undang-undang
2. Penegak Hukum
3. Faktor Sarana atau Fasilitas
4. Faktor Masyarakat
5. **Faktor Kebudayaan**

Di Dalam Pembangunan Hukum Etika dan Hukum Tidak Dapat Dipisahkan

- Silke Schiktanz



Ketika **Etika Mati** Runtuhlah Hukum



A photograph of a protest at night. In the foreground, a large banner is laid out on the ground with the text "MATINYA HUKUM INDONESIA" in white capital letters. To the left of the banner, a portrait of a man in a suit and glasses is visible. To the right, a person is holding a lit torch. The background shows a crowd of people, some wearing red headscarves, and a banner with the text "AYO REVOLUSI".

Sarjana Hukum Memainkan Peran Penting Dalam Membentuk Etika Bangsa

J.E. Sahetapy

“Moral suatu bangsa dan masa depan mental serta integritas suatu bangsa ikut dibina oleh para sarjana hukum secara eksplisit maupun implisit.

Para birokrat dan politisi bisa saja korup, asal para penegak hukum, khusus para hakim dan para advokat/pengacara/penasihat hukum memiliki moral dan integritas yang tinggi”



KOMISI YUDISIAL

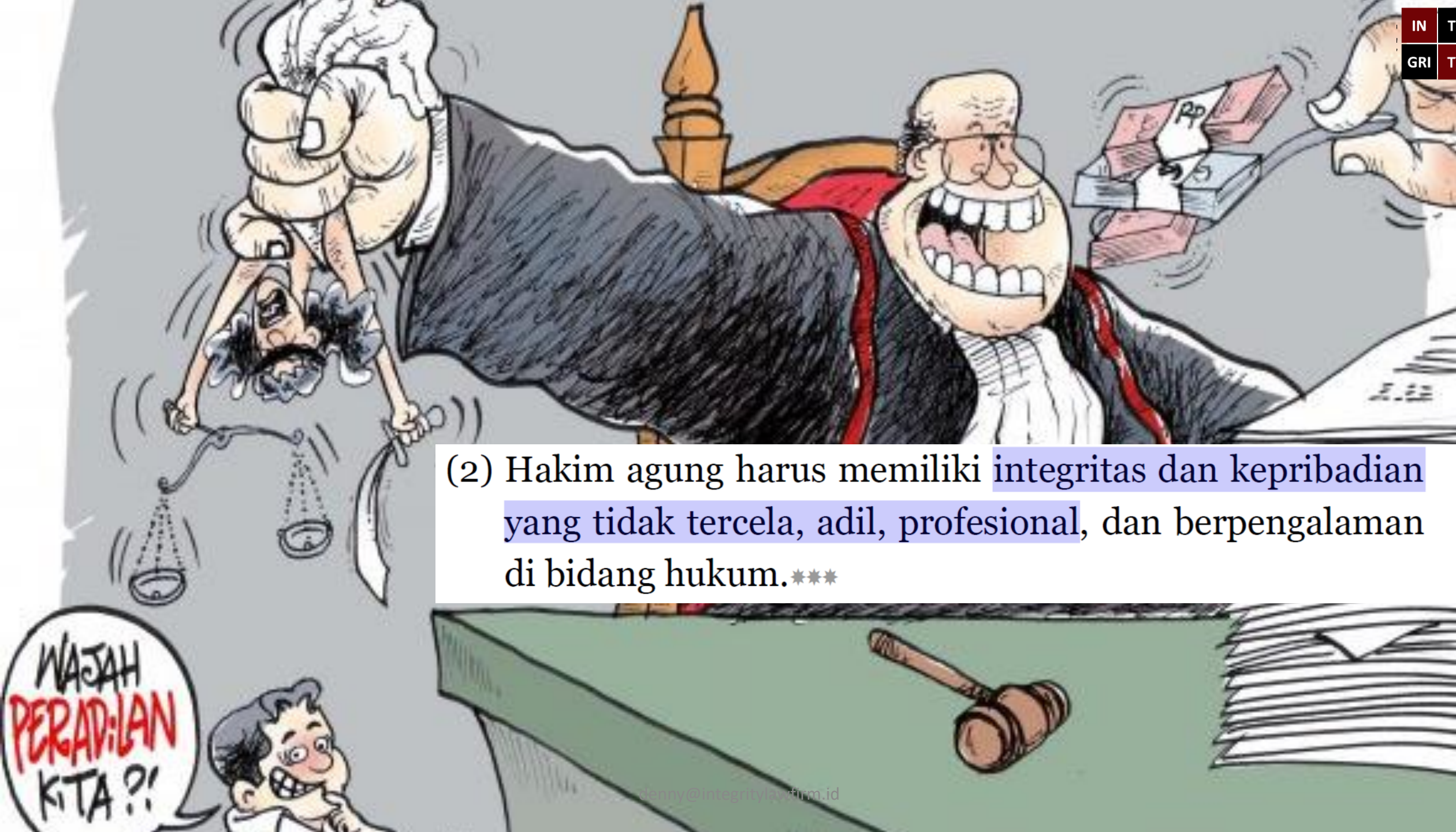
Pasal 24B

- (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.***
- (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.***

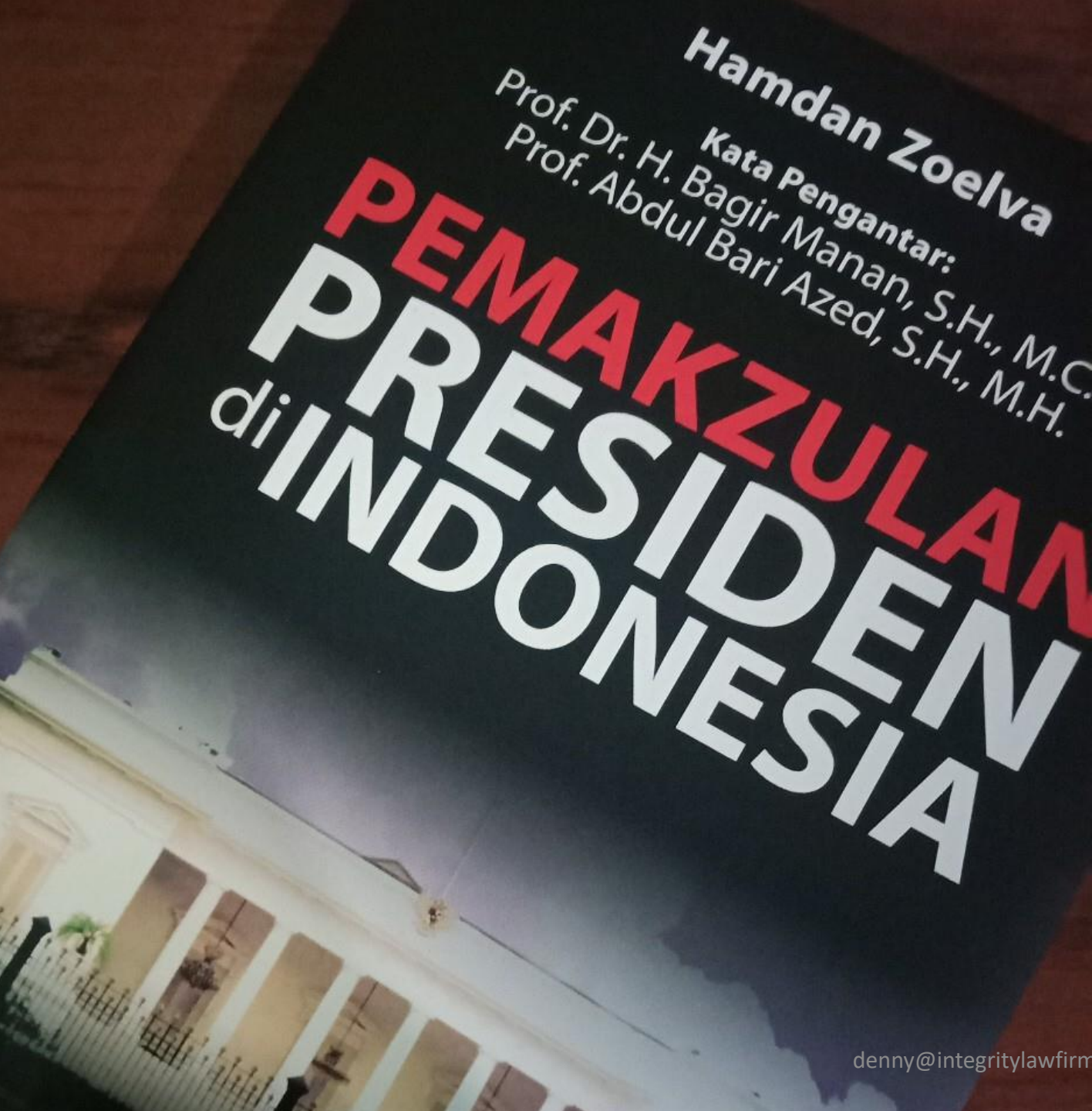
Etik HAKIM KONSTITUSI

(5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.***

MAHKAMAH KONSTITUSI



(2) Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.***



Pasal 7B

- (1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.***

1. **Etika Sosial & Budaya**
2. **Etika Politik & Pemerintahan**
3. **Etika Ekonomi & Bisnis**
4. **Etika Penegakan Hukum yang Berkeadilan**
5. **Etika Keilmuan**
6. **Etika Lingkungan**

**KETETAPAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR VI/MPR/2001**

TENTANG

ETIKA KEHIDUPAN BERBANGSA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,**



<https://www.integritylawfirm.id/buku/>

Negeri Para Mafioso

Hukum di Sarang Koruptor

Denny Indrayana

KOMPAS

Negeri Para Mafioso

Hukum di Sarang Koruptor



Denny Indrayana

Kata Pengantar: Prof. Ahmad Syafii Maarif

IN TE
GRI TY

2. Pelembagaan **Etika** dan Problem **Efektivitasnya**

PENGAWASAN ETIKA PENEGAK HUKUM: KEWENANGAN TAK BERGIGI

	PIHAK YANG DIAWASI	KEWENANGAN AKHIR
KOMISI KEJAKSAAN	JAKSA	REKOMENDASI KEPADA JAKSA AGUNG
KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL	POLISI	REKOMENDASI KEPADA KAPOLRI
KOMISI YUDISIAL	HAKIM	REKOMENDASI SANKSI KE MA

KEWENANGAN “TOOTHLESS” BERPOTENSI “USELESS”

Dua kali surat dari Komisi Kejaksaan yang menanyakan nasib 104 laporan masyarakat diabaikan kejaksaan.

Kejagung Banyak Abaikan Rekomendasi dari Komjak

Komisi Kejaksaan Nilai Jaksa Agung Terkesan Ingin Lindungi
Jaksa yang Diduga Bertemu Djoko Tjandra

Kompas.com - 11/08/2020, 20:19 WIB

Home > News > Nasional

KY: Banyak Rekomendasi Diabaikan MA Terkait Mutasi Hakim

Komisioner Kopolnas: Jika Kami Selalu Diabaikan, Lebih Baik
Bubarkan Saja

Hanya 15 Persen Rekomendasi Sanksi KY yang Ditindaklanjuti MA pada 2016-2018

**Sering diabaikan, Kopolnas minta
sarannya diperhatikan Polri**

3. Hukum **MINUS** Etika

Seleksi BPK Tanpa Etika



Bambang Widjojanto ✓

♡ 4 💬 16 📧 🔗 ⋮

NEWS · 21 September 2021 16:22 · waktu baca 3 menit

Jokowi Potensial Dimakzulkan: Bila Meresmikan Anggota BPK yang Dipilih DPR

Konten ini diproduksi oleh Bambang Widjojanto



Denny Indrayana Nilai Jokowi Tak Bisa Dimakzulkan Gara-gara Covid

Reporter: Ahmad Faiz Ibnu Sani

Editor: Amirullah

Senin, 1 Juni 2020 15:28 WIB

3 KOMENTAR

**IN TE
GRI TY** **LEGAL
UPDATE**

Problematika & Solusi Hukum atas Seleksi Anggota BPK

Adv. Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Zamrony, S.H., M.Kn., CRA.
Muhamad Raziv Barokah, S.H., M.H.

[https://www.integritylawfirm.id/
category/program/integrity-
legal-update/](https://www.integritylawfirm.id/category/program/integrity-legal-update/)

Seleksi BPK Col – Melanggar UU

- Problem di UUD 1945 – Monopoli DPR
- Dijadikan pembagian kursi antara parpol
- Melanggar UU
- Mengabaikan DPD
- Mengabaikan Fatwa MA
- Minus ETIKA bernegara

Langgar Konstitusi, Seleksi Anggota BPK Tahun Ini Dinilai Terburuk Sepanjang Sejarah

Selasa, 7 September 2021 08:48 WIB

Pilih Calon Anggota BPK Kontroversial, DPR Dinilai Langgar Konstitusi

Jum'at, 24 September 2021, 13:15 WIB

Home > News > Nasional

Tabrak UU BPK, Komisi XI akan Dilaporkan ke MKD DPR

Selasa 07 Sep 2021 12:55 WIB

Rep: Rizky Suryarandika/ Red: Agus Yulianto

Jangan Bunuh KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

DRAF REVISI
DINILAI KEBIRI KPK

KORAN JAKARTA

Denny Indrayana

Korupsi Rendahkan Kualitas
Pertumbuhan Ekonomi

Presiden Belum
Teken Surat
Revisi UU KPK

Pukat UGM Tolak
Penghancuran KPK

SOLOPOS

4 Poin
Revisi
UU KPK
Disepakati

Don't Kill KPK

Corruption Eradication Commission

DRAF REVISI
DINILAI KEBIRI KPK

KORAN JAKARTA

Denny Indrayana

Korupsi Rendahkan Kualitas
Pertumbuhan Ekonomi

Presiden Belum
Teken Surat
Revisi UU KPK

Pukat UGM Tolak
Penghancuran KPK

SOLOPOS

4 Poin
Revisi
UU KPK
Disepakati

KPK is DEAD!



STRONGER KPK: FROM LEGAL PERSPECTIVE

1. **Constitutional Organ**
2. **A Better commissioners' selection system**
3. **Limited Immunity for commissioners and staff**
4. **Independent staff, including investigative officer**
5. **More Budget**
6. **More Powers, or at least the same**
7. **Representative Office**
8. **A better supervision system**

STRONGER KPK: FROM LEGAL PERSPECTIVE



1. Constitutional Organ
2. A Better commissioners' selection system
3. Limited Immunity for commissioners and staff.
4. Independent staff, including investigative officer
5. More Budget
6. More Powers, or at least the same
7. Representative Office
8. A better supervision system

KPK is the strongest anticorruption agency in Indonesia's history

THE KILLING
NEVER STOP



■ KPK vs Polisi

**“KRIMINALISASI”
GECKO VS CROCODILE**



Balada Angkot Angket KPK

Oleh DENNY INDRAYANA

Apa hubungan antara hak angket yang diangkat DPR atas KPK dan transportasi angkot yang mengangkut penumpang kota? Sejujurnya, tak ada. Ini hanya susunan kata agar menarik menjadi judul dan enak dibaca. Lalu kenapa ang-

melihat sepele ketentuan Pasal 79 Ayat 3 UU MDG bahwa angket ditujukan untuk memudahkan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dalam hal ini UU KPK. Lebih jauh, para pendukung angket berpendapat pimpinan KPK sebagai pejabat negara tidak menjalanin rekomendasi hasil rapat kerja dengan Komisi Hukum DPR (Pasal 98 Ayat 7 UU MDG)

Penjelasan Pasal 3 mengatur: "Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan keluasaan maupun adalah keakutan yang dapat memengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota Komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun de-

dan/atau menyerahkan dokumen-termasuk BAP pemeriksaan Miryam Haryani. Pihak yang tidak memenuhi panggilan panitia angket dapat dikawatirkan sanksi meskipun paling lama hanya 15 hari. Berbeda dengan hak angket kepada ketibijakan pemerintah yang dapat berujung dengan penunjukan presiden, akhir dari angket DPR atas KPK ini tidak terlalu jelas

berantasan korupsi dan mengangket angket DPR. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya dibela dan dilindungi, atau lebih tepatnya, siapa dan mengapa?

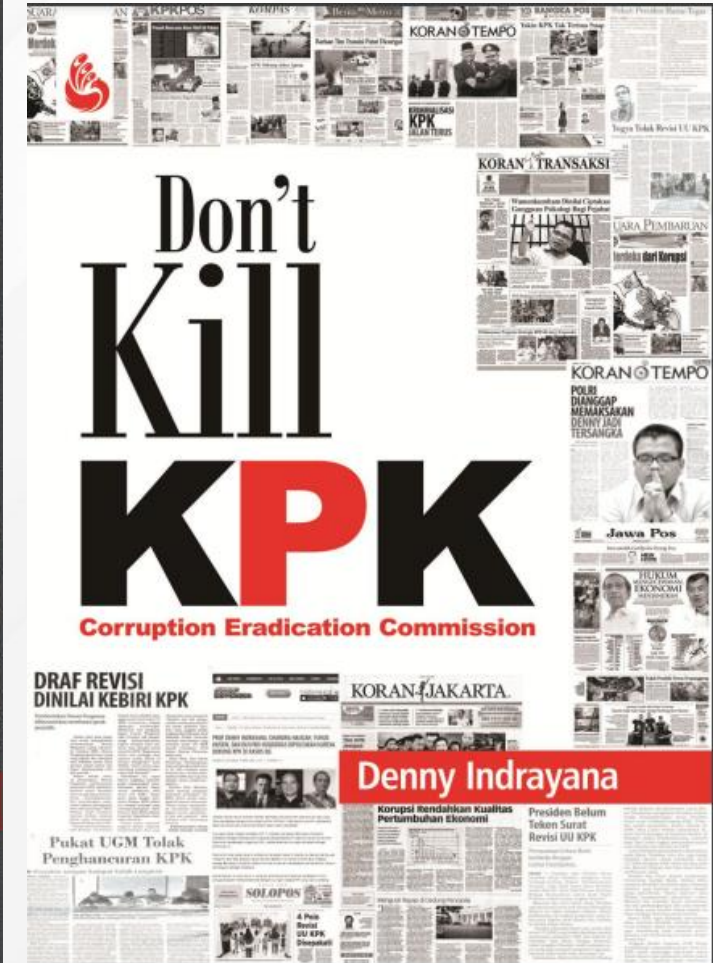
DENNY INDRAYANA
Guru Besar Hukum Tata Negara UGM; Profesor Tamu di Melbourne Law School dan Faculty of Arts University of Melbourne, Australia

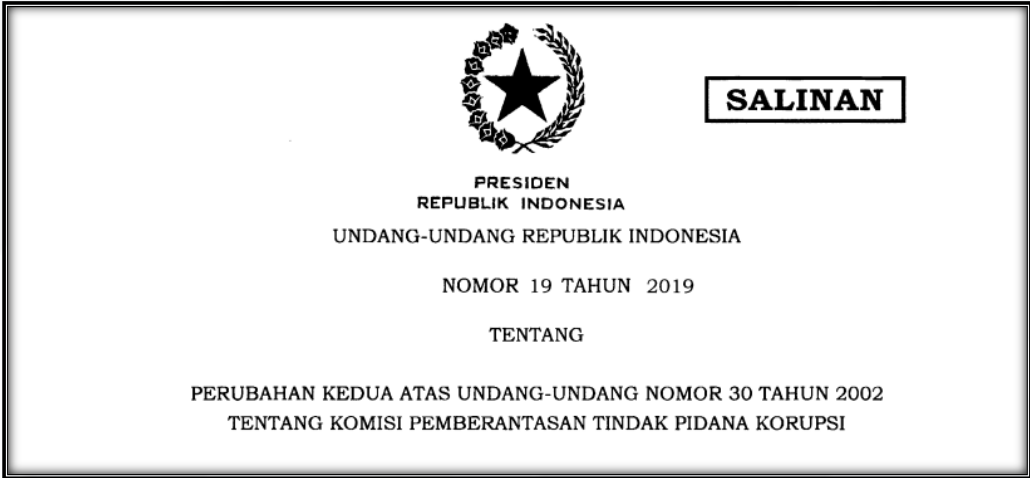
INQUIRY RIGHT: THE NEW M.O.



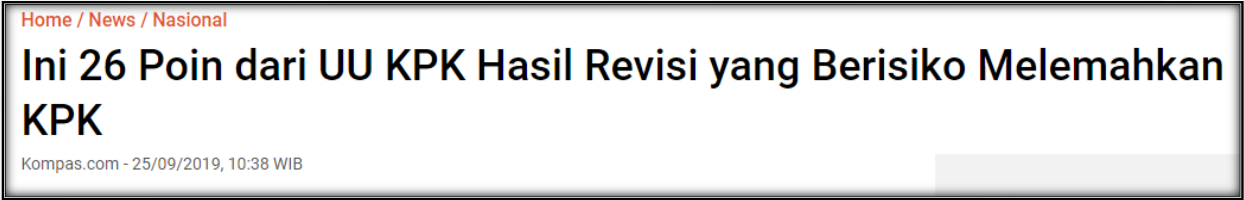
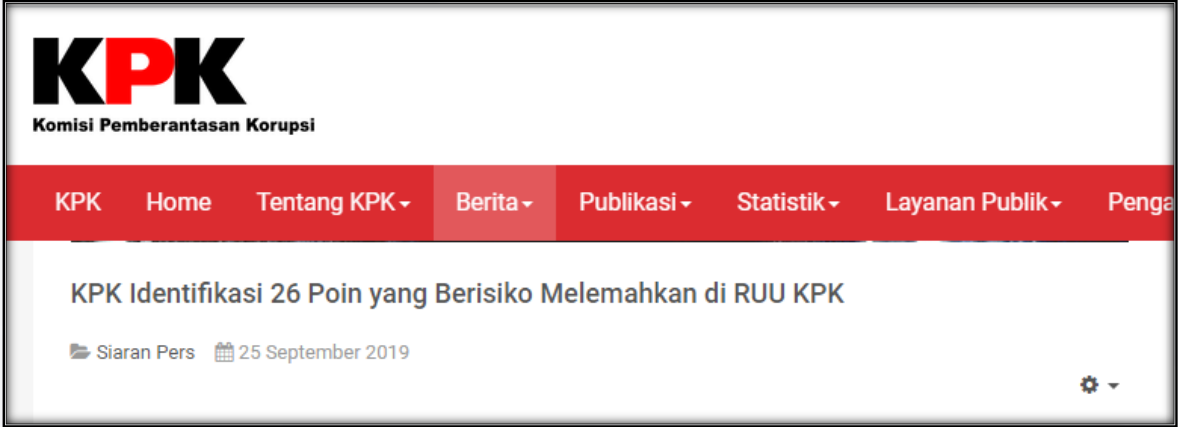
Pembunuhan KPK Secara Terstruktur

<https://www.integritylaw.id/buku/>





Melalui Revisi UU KPK, Kekuatan Politik Bergotong Royong **Membunuh KPK**



- 26 Pelemahan KPK di dalam UU 19/2009
- Presiden berdiri di dua kaki, tidak menandatangani UU 19/2019 padahal ikut andil dalam persekongkolan jahat

Krisis Etika Pimpinan KPK



2 Orang Pimpinan KPK Melanggar Kode Etik

Dewas Putuskan Ketua KPK Firli Bahuri Langgar Kode Etik!

Tim detikcom - detikNews

Kamis, 24 Sep 2020 10:23 WIB

CNBC Indonesia > News > Berita

Tercoreng! Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Langgar Kode Etik

NEWS - dob, CNBC Indonesia | 30 August 2021 12:55

Menyingkirkan Pegawai KPK yang Berintegritas

- Melalui Tes Wawasan Kebangsaan, 51 pegawai KPK diberhentikan. Awalnya berjumlah 75, 24 diantaranya dinilai masih bisa dibina;
- Diantaranya Novel Baswedan, Giri Suprapdiono, Sujanarko dan Harun Al Rasyid;
- Ombudsman Republik Indonesia menemukan pelanggaran dalam TWK;
- Komnas HAM menilai pemberhentian pegawai KPK merupakan pelanggaran HAM



Home > News > Nasional

51 Pegawai KPK Diberhentikan per 1 November 2021

Selasa 01 Jun 2021 13:24 WIB

Rep: Mimi Kartika/ Red: Indira Rezkisari

NASIONAL

Dugaan Persekongkolan Menyingkirkan Pegawai KPK

Sejumlah pemimpin lembaga negara diduga berada di balik pengusuran 75 pegawai KPK. Sebagian pegawai merupakan penyidik yang tengah mengusut kasus besar yang melibatkan elite partai politik.

EDISI, 9 JUNI 2021

Novel Baswedan: Ada Agenda Singkirkan Pegawai KPK yang Baik

CNN Indonesia | Rabu, 26/05/2021 19:53 WIB

PENURUNAN KINERJA KPK

Grafik Penanganan Perkara

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Penyelidikan	96	123	164	142	111	41
Penyidikan	99	121	199	145	91	22
Penuntutan	76	103	151	153	75	34

Diolah dari <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/109-statistik>

Institusi	Tingkat Kepercayaan Publik
Kepolisian	86,2%
Mahkamah Agung	85,9%
Kejaksaan Agung	82,2%
KPK	80,7%

Survei Cyrus Network 22 Juni 2021 diperoleh dari cnn.com



INDEKS PERSEPSI KORUPSI



SUMBER: TRANSPARENCY INTERNATIONAL 2020

Score	Country	Rank		
36	Indonesia	88	2015	
37	Indonesia	96	2016	↓
37	Indonesia	90	2017	↑
38	Indonesia	89	2018	↑
40	Indonesia	85	2019	↑
37	Indonesia	102	2020	↓



DUITokrasi Kills Indonesian **DEMO**cracy



**KECENDERUNGAN KUAT SISTEM
POLITIK DAN EKONOMI
MEMPENGARUHI PEMBANGUNAN
HUKUM YANG BERWIBAWA**

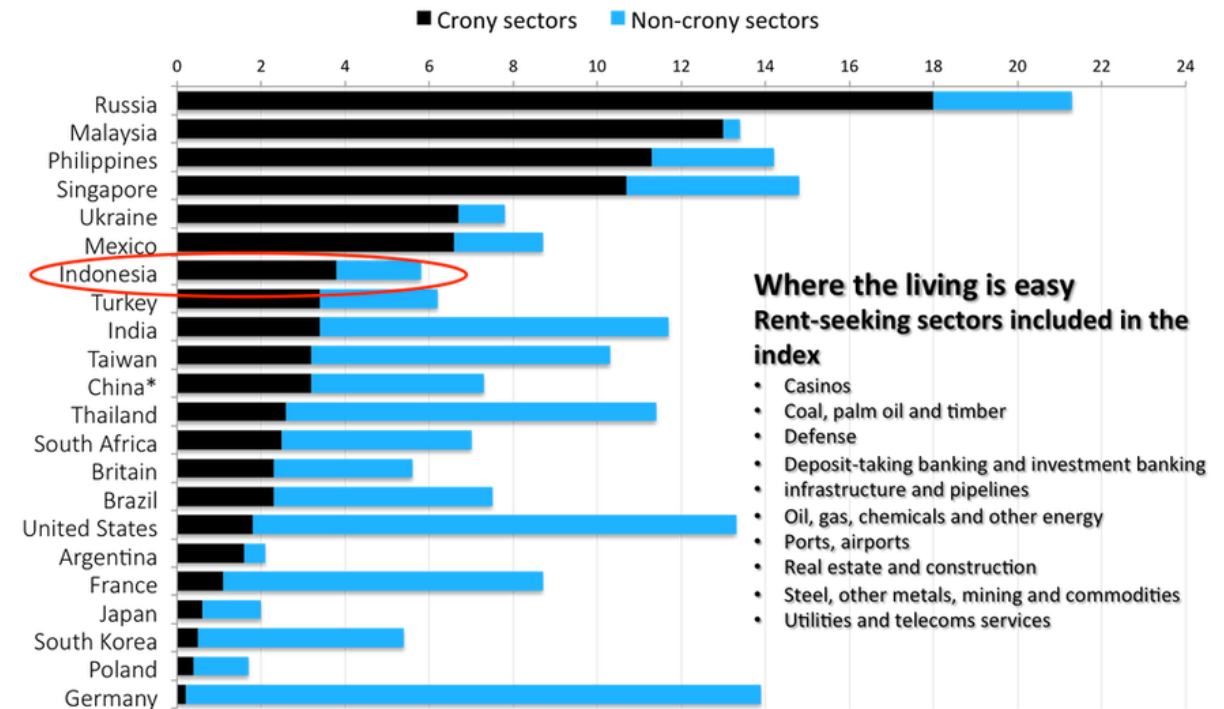
Sistem Politik yang Koruptif

- Pendanaan Politik
- Pendanaan Kampanye

Bisnis yang kolusif antara Pemerintah dengan Pengusaha

The crony-capitalism index

Billionaire wealth as a % of GDP, ranked by crony-sector wealth, 2016



Where the living is easy
Rent-seeking sectors included in the index

- Casinos
- Coal, palm oil and timber
- Defense
- Deposit-taking banking and investment banking
- infrastructure and pipelines
- Oil, gas, chemicals and other energy
- Ports, airports
- Real estate and construction
- Steel, other metals, mining and commodities
- Utilities and telecoms services

*Includes territories.

Source: The Economist, Daily chart: Comparing crony capitalism around the world (<http://econ.st/24zXocv>).

Oligarch, Media Control, and Elections

- Major media groups own five out of six Indonesian newspapers with the highest circulation, and all four biggest online news media sites. Further, ownership of TV stations is concentrated in five corporations that control 96,6% of all national stations.
- The parties become vulnerable to and dependent on oligarch - a wealthy individual or conglomerates who dominate Indonesia political parties.



Oligarch: Penguasa berpilin
dengan pengusaha

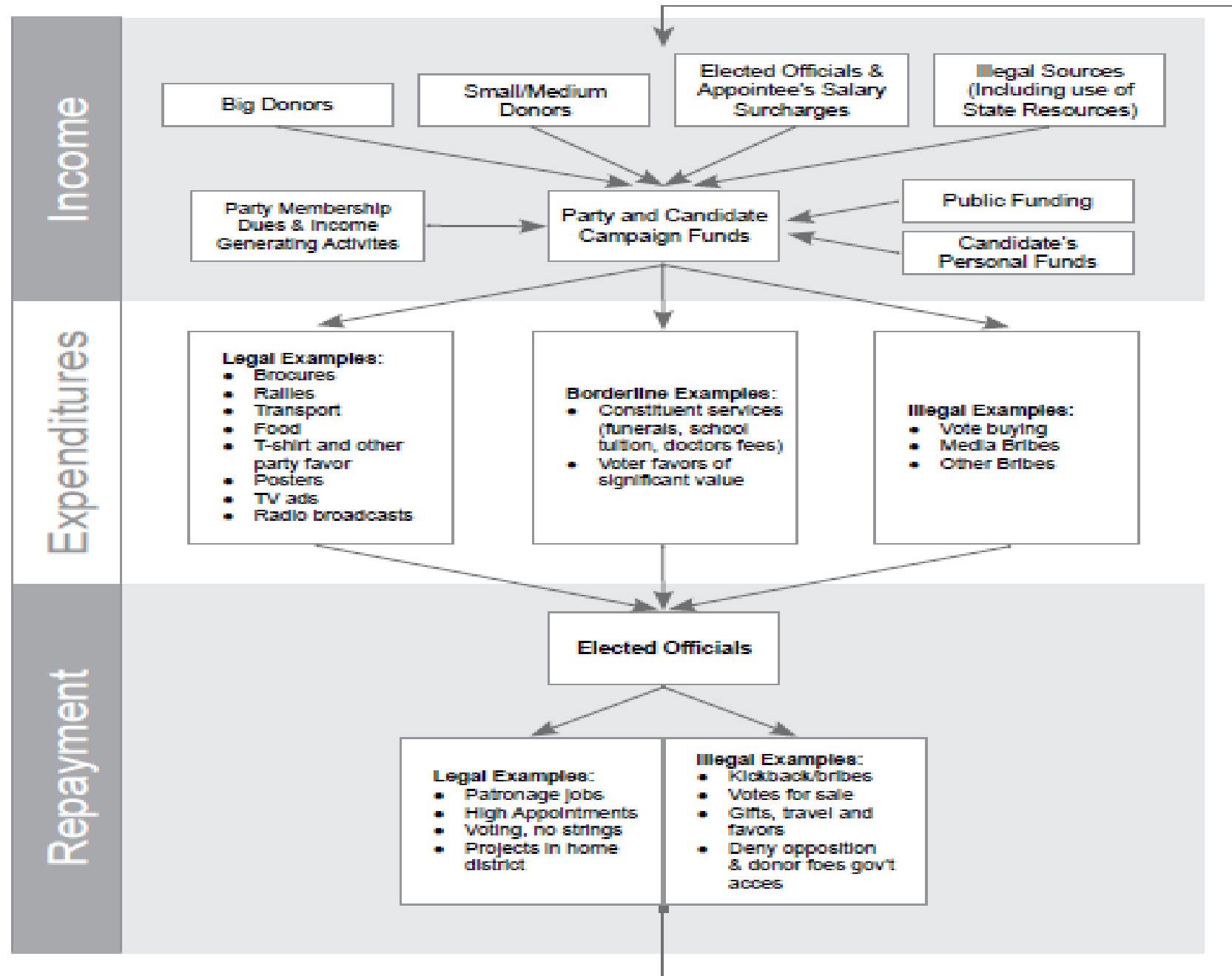
Parpol yang **Koruptif**

Media yang **Terkooptasi**

Oknum Aparat Keamanan

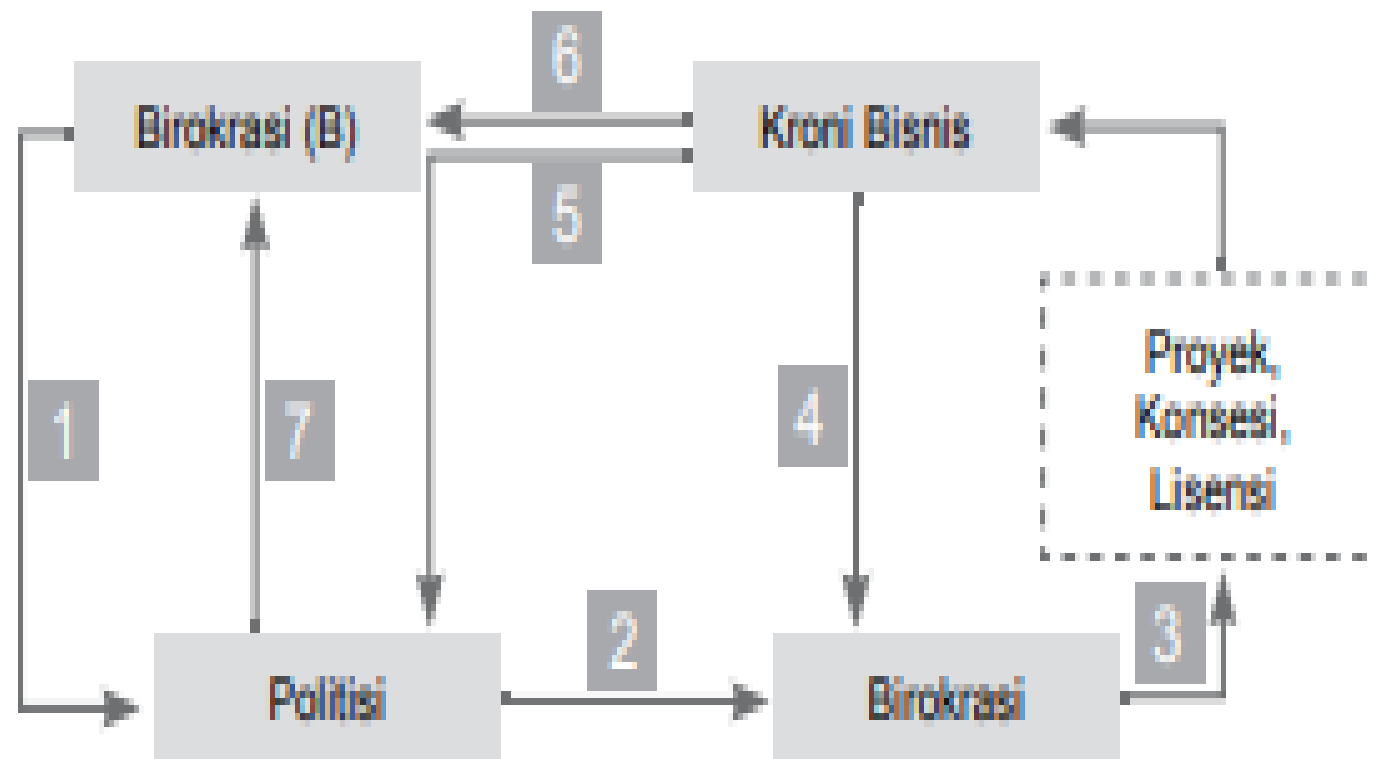
The **Real**
Power
Holders

HOW MONEY CAN INFLUENCE POLITICS



Source: Duschinsky

Lingkaran Setan Korupsi Politik



Keterangan:

1. Nominasi
2. Politisasi Birokrasi
3. Kontrak, konsesi, lisensi
4. Suap, kickback
5. Sumbangan Pemilu, Suap
6. Sumbangan Pemilu, *candidacy buying*
7. Setoran ke Partai

INTEGRITY

TIDAK TERBELI !
NO Mafia Hukum !



“Integrity is doing
the right thing,
even when no one
is watching.”

C. S. Lewis

What Next? Solusi

Putus hubungan kolusif penguasa dan pengusaha

Penguasa harus lebih independen dari kepentingan bisnis

Penegakan hukum harus lebih tegas

Mafia hukum harus diberantas

KPK harus diperkuat, bukan diperlemah, apalagi dimatikan

INTEGRITY Programs

- INTEGRITY Scholarship
- INTEGRITY Constitutional Discussion
- INTEGRITY Legal Training
- INTEGRITY Legal Update
- INTEGRITY Constitutional Advocacy

INTEGRITY
INDONESIA CENTRE FOR GOVERNANCE
CONSTITUTION, AND SOCIETY

LEGAL ADVOCACY TRAINING
"MEMBANGUN SISTEM ANTIKORUPSI DI KORPORASI"

NARASUMBER **KEYNOTE SPEAKER**

HARI KE 1 - 28 SEPTEMBER 2021
PUKUL 10.00 - 15.00 WIB

SESI I
Ganjar Laksamana, S.H., M.H.
Ahli Hukum Pidana Univ. Indonesia

SESI II
Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M.
Kepala PPATK Tahun 2002-2011
Ketua STH - Jember

HARI KE 2 - 29 SEPTEMBER 2021
PUKUL 10.00 - 15.00 WIB

SESI III
Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

SESI IV
Adnan Pandu Praja, S.H., Sp.N., LL.M.
Wakil Ketua KPK (2011-2015)
Associate Visi Integritas

SESI V
Dr. Bambang Widjojanto, S.H., M.Sc.
Wakil Ketua KPK Periode 2011-2015

SESI VI
Febri Diansyah, S.H.
Managing Partner Visi Integritas Law Office

SESI VII
Irene Putrie, S.H., M.Hum.
Kepala Subdirektorat Tindakan Hukum Lain & Pelayanan Hukum pada Direktorat Pertimbangan Hukum JAMDATUN KEJAGUNG

WAKTU PELAKSANAAN
Zoom Meeting
Selasa - Kamis, 28-30 September 2021
Pukul 10.00 WIB - 15.00 WIB

FASILITAS

- Sertifikat
- Softcopy Materi Legal Training
- Doorprize Buku dari Pematani

MATERI TRAINING

SESI I

1. Memahami Tindakan Pidana Korupsi terkait Korporasi;
2. Memahami Tindakan Pidana Pencucian Uang terkait Korporasi;

SESI II

1. Strategi Pencegahan Korupsi dan Pencucian Uang oleh Korporasi;
2. Memahami Perjanjian dan Perjanjian Pidana Korporasi;
3. Memahami Perjanjian Beneficial Ownership;

SESI III

1. Penerapan Good Corporate Governance bagi Korporasi;
2. Studi Kasus Implementasi Business Judgment Rule;

SESI IV

1. Membangun Sistem Antikorupsi di Korporasi;
2. Mencegah Penyebaran oleh Korporasi melalui Sistem Manajemen Anti Penyebaran (ISO 37001);
3. Memperkuat Pengawasan Internal Korporasi Melalui Penerapan WBS ISO 37002 (Whistleblowing Management Systems);

SESI V

1. Pengendalian gratifikasi: larangan dan batasan pemberian kepada public official;
2. Strategi menghadapi public official yang meminta uang lebih;
3. Studi kasus;

SESI VI

1. Tipologi Kasus Korupsi di BUMN dan Anak Perusahaan BUMN;
2. Strategi Pencegahan Korupsi di BUMN dan Anak Perusahaan BUMN;
3. Studi kasus;

BIAYA TRAINING
Rp. 3.000.000,- Full Paket Materi,
Rp. 500.000,- Per Sesi Materi (Minimal mengikuti 3 Sesi)

NO. REKENING PEMBAYARAN
PERMATA BANK SYARIAH
1815906299
KCS PO INDAH a/n INTEGRITY

Pendaftaran dibuka sampai dengan 26 September 2021 melalui link bit.ly/INTEGRITYTRAINING

NARAHUBUNG Abdulatif Zainal : 0821 2555 2688

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION
PHK & ISU KETENAGAKERJAAN DI TENGAH PANDEMI COVID-19: Antisipasi & Solusi Hukumnya

NARASUMBER

Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Guru Besar HTH & Senior Partner INTEGRITY

Dra. Indah Anggoro Putri, M.Bus
Dosen Pendidikan Manajemen Industri & Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Faisal H. Baer, S.E., M.A.
Executive Director

MODERATOR
Abdulatif Zainal, S.H.
Lawyer INTEGRITY

Kamis, 12 Agustus 2021
Live on Zoom, 13.00 - 16.00 WIB

DAFTAR SEKARANG!
Link Pendaftaran : bit.ly/integrityCD1

FREE

Narahubung: Dabida Rusdiana (0812-8930-8378)

Kunjungi kami di www.integritylaw.id

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION #2
URGensi AMANDEMEN KONSTITUSI DI TENGAH PANDEMI: UNTUK KEPENTINGAN SIAPA?

KEYNOTE SPEAKER
Moh. Mahfud MD
Ketua Mahkamah RI

NARASUMBER
Yudi Latief
Ketua PKH Indonesia

ARSUL SAMI
Wakil Ketua MPR RI

MODERATOR
M. Rasyid Barkah
Senior Lawyer INTEGRITY Law Firm

Bivriti Susanti
Akademisi STH - Jember

Denny Indrayana
Guru Besar HTH
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

Kamis, 26 Agustus 2021
Pukul 13.00 WIB - Selesai
Live on Zoom & YouTube INTEGRITY Law Firm

FREE REGISTRASI!!
Link Pendaftaran : bit.ly/INTEGRITYCD2
Tersedia e-certificate

Narahubung: Febry Situmorang 081248667127

Kunjungi kami di www.integritylaw.id

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION #3
PRO-KONTRA TIGA PERIODE MASA JABATAN PRESIDEN

KEYNOTE SPEAKER
Denny Indrayana
Guru Besar HTH
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

NARASUMBER
Moh. Dadari
Pengasas Komunitas Dok Pro
Direktur Eksekutif Indo Barometer

Rofly Harun
Pakar Hukum Tata Negara

MODERATOR
Widada Zebra Yohanes
Lawyer INTEGRITY Law Firm

Titi Angraini
Dewan Pembina PerLubum

Tim Lindsey
Professor Melbourne Law School,
Australia

Jumat, 17 September 2021
Pukul 13.30 WIB - Selesai
Live on Zoom & YouTube INTEGRITY Law Firm

FREE REGISTRASI!!
Link Pendaftaran : bit.ly/INTEGRITYCD3

Narahubung: Febry Situmorang 081248667127

Kunjungi kami di www.integritylaw.id

<https://www.integritylawfirm.id/category/program/integrity-scholarship/>



Integrity Scholarship 2021
PENGUMUMAN TECHNICAL MEETING

Calon peserta seleksi penerima beasiswa Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) Scholarship, yaitu para mahasiswa Fakultas Hukum tingkat akhir yang memenuhi syarat, diundang wajib mengikuti *technical meeting* pada Rabu, 6 Oktober 2021, Jam 10 WIB melalui *zoom meeting*.

Pendaftaran *technical meeting* melalui dengan mengklik formulir yang tersedia pada:
<http://www.integritylawfirm.id/2021/09/18/pendaftaran-technical-meeting>

Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Senior Partner INTEGRITY Law Firm



SCHOLARSHIP



SCHOLARSHIP

Pendaftaran Technical Meeting Beasiswa (INTEGRITY Scholarship)

Panduan Umum INTEGRITY Scholarship

Pendaftaran INTEGRITY Scholarship

INTEGRITY Scholarship

<https://www.integritylawfirm.id/category/program/integrity-scholarship/>



INTEGRITY IN TE
INDRAYANA CENTRE FOR GOVERNMENT, CONSTITUTION, AND SOCIETY GRI TY

INTEGRITY SCHOLARSHIP 2021

PENGUMUMAN TECHNICAL MEETING

Calon peserta seleksi penerima beasiswa *Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) Scholarship*, yaitu para mahasiswa Fakultas Hukum tingkat akhir yang memenuhi syarat, diundang **wajib** mengikuti *technical meeting* pada **Rabu, 6 Oktober 2021, Jam 10 WIB**, melalui *zoom meeting*.

Pendaftaran *technical meeting* silakan dengan mengklik formulir yang tersedia pada:
<http://www.integritylawfirm.id/2021/09/18/pendaftaran-technical-meeting>.



Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

www.integritylaw.id @integritylawfirm INTEGRITY Law Firm @integritylawfirm

INTEGRITY INTERNSHIP

[https://www.integritylawfirm.id/
2021/09/16/lowongan-
internship-integrity-law-firm/](https://www.integritylawfirm.id/2021/09/16/lowongan-internship-integrity-law-firm/)

INTEGRITY IN TE
INDRAYANA CENTRE FOR GOVERNMENT,
CONSTITUTION, AND SOCIETY GRI TY

LOWONGAN INTERNSHIP



SYARAT:

1. Mahasiswa tingkat akhir atau Sarjana Hukum (*fresh graduate*)
2. Memiliki pengalaman organisasi dan aktivis mahasiswa (lebih diutamakan)
3. Memiliki logika hukum, kemampuan bicara dan menulis yang meyakinkan
4. Menguasai bahasa inggris baik lisan maupun tulisan
5. Memiliki kemampuan mengoperasikan Microsoft Office

Link Pendaftaran: bit.ly/INTEGRITYINTERNSHIP

Pendaftaran Ditutup 30 September 2021



Citylofts Sudirman, Suite 1226 Lantai 12
Jl. K.H. Mas Mansyur No. 121
Jakarta 10250



www.integritylawfirm.id



@integrity_lawfirm



INTEGRITY Law Firm



@integrity_lawfrm

Visit  at:

<http://www.integritylawfirm.id>



We are the INTEGRITY



LITIGATION | CONSULTATION | RESEARCH

INTEGRITY

INDRAYANA CENTRE FOR GOVERNMENT,
CONSTITUTION, AND SOCIETY

